

## **Analisis Kebijakan *Global War On Terror (GWOT)* di Era Donald Trump**

**Oleh**

Naufal Afif Azmi dan Arina Wafa Aulia

Hubungan Internasional FISIP Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Email: [naufalafifazmi@gmail.com](mailto:naufalafifazmi@gmail.com), [fedinuril16@gmail.com](mailto:fedinuril16@gmail.com)

### **Abstrak**

Terorisme dapat dipahami sebagai suatu bentuk kekerasan dan intimidasi yang menargetkan rakyat sipil dengan tujuan politik dan ideologi. Gerakan ini sudah terbukti menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti timbulnya kecemasan, ketakutan, bahkan korban jiwa dan harta. Era baru teknologi dan informasi mampu membuat gerakan terorisme ini semakin berkembang secara signifikan. Semakin canggihnya teknologi yang diciptakan, maka jaringan dari teroris inipun semakin berkembang dengan sokongan dari negara-negara yang memiliki kepentingan terselubung di dalamnya. Tindakan terorisme yang begitu destruktif dan mengkhawatirkan terhadap keamanan global menjadi suatu ancaman internasional. Sejak terjadinya serangan terorisme di gedung World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001, *counter terrorism* menjadi suatu prioritas bagi Amerika Serikat. Munculnya *Global War On Terrorism (GWOT)* yang mulai dicanangkan oleh Mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush menjadi suatu langkah konkret untuk memerangi terorisme. Langkah ini diteruskan hingga masa kepemimpinan Obama dan Trump, namun dengan pengaplikasian kebijakan yang berbeda. Di masa kepemimpinan Trump yang terkenal dengan slogannya '*Make America Great Again*', banyak kebijakan yang dianggap kontroversial. Namun kebijakan ini tentunya diambil setelah menimbang beberapa faktor. Penelitian ini menggunakan teori *Decision Making* yang berfokus untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebijakan yang dihasilkan oleh Trump mengenai *Global War On Terrorism (GWOT)*.

Kata Kunci: Counter Terrorism, Global War on Terror, Gerakan Terorisme.

### **Abstract**

*Terorrism can be understood as an act of violence and intimidation that target civilians in the pursuit of political and ideological aims. This movement has been proved that it caused the world be full of feeling frighten, afraid, and victims. Technology and information era could make terrorism movement develops significantly. The more sophisticated technology which appeared, the easier terrorist gets its networks with support from countries that have latent interest on it. This destructive terrorism movement becomes an International threat toward global security. Since terrorism attack that happen in World Trade Center (WTC) at September 11th 2011, counter terrorism started to be a priority for Unites States. Global War On Terrorism policy become a concrete step from George W. Bush to begin a war on terror. This action is continued till Obama and Trump era, yet with different policy application. In Trump era, which is well-known by his slogan 'Make America Great Again', much policies that are reputed controversial. But all those policies is certainly taken by so much considerations. This research used 'Decision Making' theory that has focused to elaborate some factors which influence Trump's different policy making about Global War On Terrorism (GWOT).*

*Keywords: Counter Terrorism, Global War on Terror, Act of Terrorism.*

### **PENDAHULUAN**

Serangan terhadap menara kembar *World Trade Center (WTC)* dan Pentagon di New York dan Washington DC pada 9 September 2011 menjadikan isu terorisme sebagai isu sensitif di Amerika Serikat. Peristiwa ini merupakan serangkaian serangan bunuh diri yang dilakukan dengan membajak 2 pesawat Boeing 767-223ER dan ditabrakkan ke gedung WTC dan Pentagon.<sup>1</sup> Pemerintahan Bush segera menetapkan organisasi militan islam *Al-Qaeda Associated Movement (AQAM)* yang dipimpin oleh Osama bin Laden sebagai oknum yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Al-Qaeda diduga melakukan serangan yang begitu destruktif ini sebagai bentuk balas

---

<sup>1</sup> Nugraha, Fajar. (2015). "11 September 2001, Serangan di Tanah Amerika Serikat" diakses dari (<https://www.medcom.id/internasional/amerika/nbw6a85N-11-september-2001-serangan-di-tanah-amerika-serikat>) pada 7 Agustus 2019

dendam atas intervensi yang terus dilakukan AS di Perang Teluk untuk mendukung Israel.

Pada awal mulanya, *Central Intelligence Agency (CIA)* sudah memprediksikan bahwa serangan Al-Qaeda akan segera terjadi walaupun dalam kerangka waktu yang masih fleksibel. Namun, prediksi CIA dibantah oleh pihak Pemerintahan dengan menyatakan bahwa CIA telah berhasil dikelabui Osama bin Laden yang hanya berpura-pura merencanakan serangan untuk mengalihkan pemerintahan dari Saddam Hussein, yang dipandang oleh para neokonservatif sebagai ancaman yang lebih besar. Namun pada akhirnya, serangan benar-benar diluncurkan dan pihak White House telah gagal dalam mengambil langkah yang signifikan untuk memerangi terorisme.<sup>2</sup>

Sebagai respon atas peristiwa tersebut, Presiden George W. Bush membuat suatu langkah tegas dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri '*War On Terror*' yang bekerja sama dengan Britania Raya dan didukung oleh *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*. Bush berhasil menggerakkan Dewan Keamanan PBB, NATO, dan Uni Eropa untuk bergerak cepat membangun kebijakan *counterterrorism*. AS bahkan berhasil menggalang 33 negara untuk bergabung dalam pasukan koalisi yang langsung dipimpin AS sendiri. Bush menyatakan kebijakan ini sebagai suatu perang melawan terorisme melalui jalur militer.<sup>3</sup>

Tak ingin terlalu banyak basa-basi, pada 14 September 2001, *Authorization For Use of Military Force (AUMF)* resmi menjadi bagian dari hukum Amerika Serikat yang sah. Dalam AUMF ini, presiden Amerika Serikat dapat secara legal menggunakan segala hal yang dibutuhkan untuk melawan bangsa, organisasi, maupun sekelompok orang yang dicurigai merencanakan, mengotorisasi, melakukan, dan mendanai serangan terorisme 11 September 2001. Selain itu, AUMF juga dilegalkan untuk mencegah serangan terorisme dalam bentuk apapun ke Amerika Serikat. Dengan otoritas ini, Amerika Serikat segera melancarkan misinya untuk menumpas berbagai bentuk

---

<sup>2</sup> Eichenwald, Kurt.(2012). "The Deafness Before the Storm" diakses dari (<https://www.nytimes.com/2012/09/11/opinion/the-bush-white-house-was-deaf-to-9-11-warnings.html>) pada 7 Agustus 2019

<sup>3</sup> History.com, "*A Timeline of the U.S-Led War on Terror*" diakses dari (<https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline>) pada 7 Agustus 2019

terorisme di negara-negara yang berpotensi menjadi sarang persembunyian kelompok terorisme, seperti Afganistan dan Irak.<sup>4</sup>

Selama 15 tahun, konsistensi strategis yang cukup besar telah dilakukan di era kepresidenan George Bush dan Barack Obama. Namun, segala usaha yang dilakukan AS, baik dari pasukan yang dikerahkan maupun biaya triliunan dolar yang dikeluarkan terbukti tidak sebanding dengan hasil yang didapat hingga sekarang. Amerika Serikat masih sama rentannya dengan negara lain dalam menghadapi terorisme.

Berdasarkan tulisan karya A. Trevor Thrall dan Erik Goepner yang berjudul *Step Back: Lessons for U.S. Foreign Policy from the Failed War on Terror*, sebenarnya terdapat dua faktor yang menyebabkan War on Terror di era Bush dan Obama dapat dikatakan gagal. Pertama, adanya penilaian yang berlebihan mengenai jumlah anggota dan kapabilitas dari suatu kelompok teroris. Akibatnya, usaha yang dikerahkan pun terlalu masif, membuat Amerika Serikat tidak hanya berusaha mengeliminasi kelompok teroris tertentu sebagai sumber terorisme 9/11, tetapi terobsesi untuk menghancurkan seluruh kelompok terorisme di dunia. Namun dengan ini, Amerika dapat dinyatakan tidak berhasil dalam menumpas permasalahan utama dan justru membuat sumber permasalahan baru yang seharusnya tidak diperlukan.

Kedua, Terdapat beberapa aspek yang dapat dikatakan sebagai kesalahan strategi. Alih-alih hanya sekadar meredam terorisme, AS malah menggunakan strategi berbasis politik, strategi menggunakan kekuatan militer, dan strategi berbasis usaha untuk mengatur urusan domestik negara lain yang dapat dikatakan sebagai intervensi. Ketiga aspek kesalahan strategi ini terkonstitusi satu sama lain, membuat usaha-usaha Amerika Serikat meredam terorisme menjadi kontra-produktif.<sup>5</sup>

Donald Trump sebagai presiden terpilih sekarang mengambil kendali untuk menentukan ujung tombak perang melawan terorisme. Apapun kebijakan yang diambil oleh Trump tetap harus mempertimbangkan segala yang telah dianalisis dalam kegagalan strategi melawan terorisme di era Presiden Bush dan Obama.

---

<sup>4</sup> Hafizh(2018). "Kegagalan War on Terror, 17 Tahun Setelah 9/11" diakses dari (<https://www.asumsi.co/post/kegagalan-war-terror-17-tahun-setelah-911>) pada 7 Agustus 2019.

<sup>5</sup> Trevor Thrall and Erik Goepner, "Step Back: Lessons for U.S. Foreign Policy from The Failed War on Terror" Jurnal Policy Analysis No. 814, 2017, Hal 1.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor dapat mempengaruhi kebijakan *Global War On Terror (GWOT)* di Era Donald Trump?

## KERANGKA TEORI

1. Teori Politik Luar Negeri ('Decision Making' Lloyd Jensen)

Asumsi dasar teori *Decision Making* yang dikemukakan oleh Lloyd Jensen yaitu tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.<sup>6</sup> Sehingga aktivitas analisisnya berada pada pembukaan kotak hitam (*blackbox*) dari perspektif analisis adaptif dan perspektif strategi.

Teori ini relevan dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian karena pada teori ini peranan kepemimpinan persepsi, dan sistem kepercayaan dari para pembuat keputusan, arus informasi di antara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka merupakan faktor-faktor penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.<sup>7</sup> Teori ini menyatakan bahwa faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision-makers*).

Perspektif ini lebih menekankan pada analisis jaringan birokrasi organisasi dengan prosedur-prosedur kelembagaannya.<sup>8</sup> Alat analisis dalam perspektif ini berhubungan dengan struktur dan proses dari pengambilan

---

<sup>6</sup> Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal. 7.

<sup>7</sup> Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin, eds., *Foreign Policy Decision-Making: Analytical perspective to the Study of International Politics*, New York, The Free Press, 1962 ; ValerieM. Hudson, Derek H. Chollet, and James M. Goldgeier, *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*.New York, Palgrave Macmillan, 2002.

<sup>8</sup> Anderson Paul A. 1987. "What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision?The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy", in Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr., and James N. Rosenau, eds., *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston, Unwin,hal. 285-308

keputusan politik luar negeri sampai kepada analisis keputusan-keputusan tertentu.<sup>9</sup>

Kelebihan model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari proses politik luar negeri itu sendiri. Maka itu faktor-faktor paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah:

1. Nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh pembuat keputusan
2. Jaringan informasi mereka
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri
4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

### **Analisis Faktor yang mempengaruhi Kebijakan *Global War On Terror (GWOT)* di Era Donald Trump**

Kebijakan War on Terror yang selama ini telah diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) selalu diukur efektivitasnya. Penilaian berdasarkan *level of analysis* telah diterapkan dan menekankan pada hasil yang mengarah pada musnahnya kelompok teroris, khususnya kelompok teroris yang bertanggung jawab atas peristiwa 9/11. Bagaimanapun juga, setiap analisis dan penilaian yang dilakukan harus menjawab perihal apakah usaha AS ini mampu mengurangi ancaman terror sejak peristiwa bersejarah tersebut terjadi ataukah sebaliknya.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa *war on terror* masih dianggap gagal. Pertama, walaupun setelah itu Amerika Serikat tidak mengalami teror yang berarti kembali setelah peristiwa 9/11, namun tak ada bukti yang menunjukkan bahwa intervensi ini memiliki dampak yang besar selain membunuh ribuan anggota teroris. Hal ini juga tak membuat warga negara Amerika merasa lebih aman seperti sebelum terjadinya peristiwa 9/11. Dapat dikatakan bahwa usaha penyerangan untuk melawan terorisme yang telah dilakukan tidak terlalu berdampak pada angka terorisme di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, intervensi yang dilakukan membuat warga negara Amerika merasa lebih tidak aman dari sebelumnya.

Kedua, Amerika Serikat tidak menyerang Al-Qaeda, Negara Islam, atau kelompok teroris global terlepas dari seberapa baik atau buruknya deskripsi tersebut

---

<sup>9</sup> John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., hal. 59.

terhadap kelompok yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan anggota. Amerika Serikat yang seharusnya mengurangi faktor mendasar penyebab terorisme malah menjadi penyebab kebangkitan terorisme. Sebaliknya, lebih banyak orang Amerika yang meninggal akibat serangan teror dan ada lebih banyak serangan yang diinisiasi kaum islamis di tanah air dibanding sebelum peristiwa 9/11, sementara jumlah kelompok teroris islam berkembang pesat setelah dimulainya perang melawan terorisme. Apalagi dengan meroketnya jumlah serangan teroris di dunia mengindikasikan bahwa kondisi ini dapat mengarah pada keadaan yang lebih buruk dibanding sebelum adanya perang melawan terorisme.

Kritik lain dalam konsep Global War On Terror (GWOT) dari Bush ini tujuan utama yang seolah telah berubah mata anginnya seiring dengan obsesinya di dalam perang Irak. Setelah keputusannya untuk menyerang Taliban dari Afghanistan dipuji sebagai sebuah langkah brilian yang tidak mungkin diambil oleh semua presiden AS, Bush justru melakukan invasi ke Irak yang sudah sangat jelas jauh dari keefektifan tujuan awal pembentukan GWOT yaitu justru berfokus kepada masalah *Weapon Mass Destruction (WMD)*. Perang Irak dapat dianggap sebagai kesalahan kebijakan luar negeri AS yang terbesar, pada perang ini AS kehabisan dana hingga US\$ 5 miliar dan menewaskan sebanyak 4.000 nyawa rakyat Amerika, ini membuat perang Irak menjadi sebuah bencana monumental.<sup>10</sup>

Dalam invasi Irak, Bush mengerahkan begitu banyak sumber daya AS tanpa menghiraukan upaya diplomasi. Tak hanya itu, Bush juga mempergunakan kamp Guantanamo untuk memenjarakan para teroris dan tersangka tragedi serangan teroris 9/11. Sejak saat itu, kamp ini diperuntukkan bagi tahanan yang tertuduh melakukan tindakan terorisme.<sup>11</sup> Pengetatan kamp penjara Guantanamo yang dikhususkan untuk para tersangka teroris pun dianggap sebagai sebuah katalis untuk meradikalisasi puluhan juta umat Muslim, dan hal ini telah membuat AS kehilangan kepercayaan di Timur Tengah. Bush bertanggung jawab atas AS yang seolah dianggap mengalami deglobalisasi.

---

<sup>10</sup> *George W Bush: Winning the War on Terror*, diakses dari: (<http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3965454/George-W-Bush-winning-the-war-on-terror.html>), pada 20 Agustus 2019.

<sup>11</sup> *The Guardian: Guantanamo Bay branded 'a symbol of Islamophobia of Trump presidency'* (<https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/11/guantanamo-bay-branded-a-stain-on-us-human-rights-record>), diakses pada 20 Agustus 2019.

Pelaksanaan GWOT semakin dianggap sebagai penyebar tindakan kekerasan baru yang dilegalkan oleh Negara. Tindakan Bush dipandang sebagai suatu pembenaran untuk menciptakan teror yang lebih berbahaya. Strategi yang dilaksanakan dalam GWOT seperti memiliki kesamaan terhadap terorisme itu sendiri. Perang yang dilakukan telah menjatuhkan korban-korban tak bersalah yang mengundang kecaman internasional terhadap membeloknya tujuan awal dari GWOT ini.

### **Faktor Insekuritas**

Di era berkembangnya berbagai ancaman dan tantangan, proyeksi *hard power* memang dibutuhkan, tetapi dalam penggunaannya kebijaksanaan pemerintah sangat diperlukan juga. Kebijakan GWOT yang diambil Bush secara impulsif pasca peristiwa 9/11 menimbulkan reaksi ketakutan yang disangkut pautkan dengan Islamophobia yang begitu menyudutkan Islam. Sebagian besar warga masyarakat AS pun ikut terpengaruh untuk melakukan tindak diskriminasi terhadap kaum Muslim di AS. Islamophobia di AS memunculkan sentimen keagamaan terhadap Muslim. Karena peristiwa ini, citra Amerika menurun di mata dunia, khususnya dunia Islam, akibat kebijakan *hard power* Bush dan mengakibatkan Islamophobia berkembang. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas hubungan AS dengan dunia Islam. Dengan rasionalitas seperti ini, maka sasaran kepentingan nasional AS yang berada di kawasan tersebut dikhawatirkan sulit untuk tercapai.

Apabila pemimpin selanjutnya tidak mampu mengembalikan citra AS di dunia internasional, maka hal ini akan mempercepat penurunan kekuatan AS secara global, dan lebih lanjut membawanya ke dalam jurang kehancuran. Dengan rasionalisasi tersebut, Obama dianggap cukup berhasil dalam melakukan upaya-upaya untuk mengatasi sentimen anti-Amerika di dunia Islam akibat Islamophobia di AS. Dengan upaya menggunakan *soft diplomacynya*, Obama condong untuk memandang islam sebagai agama yang membawa perdamaian dan kerjasama. Obama dengan keras mengumandangkan bahwa sesama agama harus saling menghormati, tidak ada diskriminasi yang memperlihatkan sisi ketidakmanusiawian.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan Obama adalah menolak sikap Islamophobia. Dalam pidato-pidatonya Obama selalu menyelipkan penolakan-penolakan terhadap Islamophobia, bahwa tidak semua Muslim merupakan teroris dan Muslim berbeda dengan kelompok ekstrimis seperti Al-Qaeda dan ISIS. Baginya

penting untuk bekerjasama bersama Muslim dan dunia Islam untuk melawan kelompok eksterimis yang mengatas namakan dirinya Muslim.

Walaupun demikian dalam perspektif warga negara Amerika, berbagai faktor yang begitu domain seperti, perbedaan latar belakang budaya dan agama, perbedaan nilai-nilai moral dan etika, persepsi tentang hubungan tentang gender, demokratisasi penduduk Arab di mass-media tetap menjadi faktor penghambat keberhasilan dalam mengintegrasikan islam di AS. Karena itu, citra positif terhadap imigran Muslimpun tidak mudah untuk diubah.<sup>12</sup>

Namun kondisi ini seakan semakin diperkeruh dengan semenjak dilantiknya Trump sebagai presiden AS dengan sikap anti-islamnya yang lebih nyata. Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump menerapkan Kebijakan politik luar negeri yang menimbulkan ancaman bagi hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga, khususnya negara Muslim. Trump melakukan suatu larangan masuk ke AS bagi 7 negara muslim (Irak, Iran, Sudan, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman) karena dianggap kehadiran Muslim di AS dapat mengancam keamanan dan kedamaian warga AS. Tidak sedikit dari kelompok imigran tersebut diduga anggota ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) menyusup ke AS sebagai pencari suaka politik atau pengungsi internasional.

Isu imigran sendiri bukan hal baru di AS, termasuk imigran Muslim. Kebijakan Trump tersebut semakin memperketat pemeriksaan atau pengontrolan terhadap imigran Muslim yang menjadikan AS sebagai tujuan mereka. Trump beralih dengan adanya kebijakan tersebut adalah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keamanan AS dari warga negara-negara yang diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara signifikan di kawasan, atau negara itu dianggap sebagai "tempat berlindung" bagi teroris.

Di balik adanya kebijakan ini, Trump sebagai aktor sekuritisasi berusaha menggambarkan bahwa AS sedang dalam kondisi tidak kondusif dan di luar kendali mengenai masalah yang berhubungan dengan masalah imigran. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan belasan juta imigran ilegal yang membawa masalah mulai dari perdagangan narkoba, kejahatan seksual, tindakan kriminal, hingga berbagai imigran radikal Islam yang dianggap dalang dan mendukung banyaknya aksi terorisme di AS. Sehingga

---

<sup>12</sup> Susan Lindauer, *Extreme Prejudice: The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover Ups of 9/11 and Iraq*, Create Space Independent Publishing Platform, 2010, hlm. 17-18.

melalui penyampaian pidato keamanan, Trump mengalihkan isu migrasi menjadi isu nasional dan mengeluarkan kebijakan tentang imigrasi.

### **Faktor Politik**

Dalam sebuah sistem politik suatu negara terdapat banyak tuntutan dan dukungan merupakan sebuah unit yang mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan akan membentuk kondisi politik suatu negara. Kondisi politik dalam negeri akan sangat berpengaruh dalam mempengaruhi para pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Kondisi pemerintahan yang sedang berkuasa juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat. Kebijakan pemerintah AS dipengaruhi situasi politik negeri dimana terdapat harapan besar dari sebagian masyarakat AS terhadap pemerintahan presiden.

Dalam sistem politik AS yang menganut pemerintahan demokrasi terdapat suatu pandangan politik bahwa lembaga politik atau pemerintah menerjemahkan keinginan rakyatnya dalam Kebijakan Luar Negeri. Opini publik digunakan sebagai alat oleh pengambil keputusan dan *policy influencers* lainnya, seolah-olah sekedar menjadi suatu kekuatan yang mengarahkan para pengambil keputusan. Sistem *polling* atau jejak pendapat dalam pemerintahan AS sudah dimulai sejak masa kampanye pemilu calon presiden John F. Kennedy dan sejak saat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kantor kepresidenan.

Dalam pemerintahan di AS opini publik dalam bentuk hasil *polling* atas popularitas presiden merupakan salah satu senjata andalan dalam menekan kongres, birokrasi, maupun kelompok kepentingan. Kongres secara konstitusional memiliki otoritas dalam bidang politik dan keamanan nasional, dan rajin mengikuti perkembangan masyarakat terhadap Presiden yang disajikan dalam bentuk *polling*. Atas dasar *polling* atau jajak pendapat yang juga merupakan janji kampanye ini lah yang mendasari kebijakan pelarangan muslim imigran. Namun, ternyata respon publik justru berlawanan, sehingga demo besar-besaran terjadi di berbagai Negara-negara Bagian untuk turut mengecam kebijakan tersebut. Partai Republik yang pendukungnya tergolong rasis dan diskriminatif terhadap suku bangsa lain, khususnya Negara-negara Muslim.

### **Faktor Personal Pengambil Kebijakan**

Salah satu kebijakan yang Trump janjikan pada saat kampanye adalah tentang pelarangan imigran Muslim ke AS. Kebijakan pelarangan imigran tersebut juga dipengaruhi oleh sensitifitas Trump terhadap Islam yang dapat dilihat melalui cuitan-cuitan *Twitter* yang Trump tulis dan bagikan, misalnya cuitan tentang penyerangan yang dilakukan oleh teroris di Orlando, di San Bernardino, di pusat Kota London, dan lain sebagainya. Meskipun cuitannya dianggap kontroversi, pengelola jejaring sosial *Twitter* mengatakan tidak akan memblokir akun Trump karena cuitan pemimpin diperlukan untuk membangun dialog publik mengenai isu politik dan lainnya.<sup>13</sup>

Media pun tidak pernah absen memberitakan tentang kebijakan pelarangan imigran Muslim Trump. Berbagai media mencoba mengulas tentang hubungan Trump dengan Islam, tentang bagaimana kebijakan Trump yang dianggap kontra atau tidak berpihak kepada umat Muslim.<sup>14</sup> Larangan imigran dari tujuh negara mayoritas Islam yaitu Iran, Irak, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman semakin memperkuat Trump anti Islam. Kebijakan tersebut seperti menerjemahkan bagaimana pandangan pribadi Trump tentang Islam. Tak jarang kampanye yang dilakukan Trump dianggap sebagai kampanye anti Islam. Bagi Trump dari dulu hingga sekarang AS memiliki masalah dengan Islam. Hal itu adalah skeptisme Trump terhadap kaum minoritas di AS seperti masyarakat pendatang dan kaum Muslim tersebut.

Perbedaan-perbedaan yang begitu jauh antara Obama dan Trump kemudian menjadi suatu perhatian. Trump merupakan sosok yang memiliki kepribadian kontras dengan Obama hampir dalam segala hal. Latar belakang keduanya yang berbeda pun mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan. Trump lahir dan dibesarkan dari seorang imigran putih yang berhasil dalam bisnis. Sebagai orang berkulit putih yang merupakan identitas nasional AS, Trump tidak mendapatkan kesulitan bergaul dan tidak pernah merasakan apa dan bagaimana rasanya hidup termarginalkan. Sedangkan Obama adalah seorang *Afro American* yang masih merasakan tindakan diskriminatif warga putih, tumbuh dari kelas bawah, bergaul dengan masyarakat yang termarginalkan. Pengaruh latar belakang ini terlihat dari kampanye keduanya. Kampanye Obama dianggap lebih

---

<sup>13</sup> *Bikin Cuitan Kontroversial, Trump Tidak Diblokir Twitter*, diakses melalui (<https://dunia.tempo.co/read/1048417/bikin-cuitan-kontroversial-trump-tidak-diblokir-twitter>) diakses pada 20 Agustus 2019

<sup>14</sup> *Kontroversi Tahun Pertama Trump Sebagai Presiden*, diakses melalui (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171229172324-139-265537/video-kontroversi-tahun-pertama-trump-sebagai-presiden>) diakses pada 20 Agustus 2019

menyatukan dan menjembatani perbedaan di antara semua kalangan, khususnya terhadap umat Muslim.

## **PENUTUP**

Pergantian pemimpin di Amerika Serikat menyebabkan adanya perbedaan kebijakan luar negeri yang dihasilkan mengenai GWOT. Perbedaan-perbedaan kebijakan ini tentunya juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Di era Trump sendiri, ditemukanlah beberapa faktor. Pertama, faktor insekuritas yang melatarbelakangi kebijakan *ban muslim*. Dalam perspektif Trump, kebijakan tersebut merupakan upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan AS dari warga negara-negara yang diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara signifikan di kawasan, atau negara itu dianggap sebagai "tempat berlindung" bagi teroris.

Kedua, faktor politik. Dalam negara demokrasi, terdapat suatu pandangan politik bahwa lembaga politik atau pemerintah harusnya dapat menerjemahkan keinginan rakyatnya dalam menentukan Kebijakan Luar Negerinya. Dalam pemerintahan di AS opini publik dalam bentuk hasil *polling* atas popularitas presiden merupakan salah satu senjata andalan dalam menekan kongres, birokrasi, maupun kelompok kepentingan. Kongres secara konstitusional memiliki otoritas dalam bidang politik dan keamanan nasional, dan rajin mengikuti perkembangan masyarakat terhadap Presiden yang disajikan dalam bentuk polling. Atas dasar polling atau jajak pendapat ini lah yang juga mendasari kebijakan pelarangan muslim imigran.

Ketiga, Faktor Personal Pengambil Kebijakan. Sebagai warga negara AS mayoritas, Trump sangat terlihat dengan sikap anti-islamnya yang nyata. Dari latar belakangnya yang lahir di kalangan kulit putih yang merupakan identitas nasional AS, cukup jelas apabila islamophobia sudah tertanam di lingkungannya. Jadi, tak heran apabila Trump begitu skeptis terhadap muslim dan terbawa sampai kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya.

## **Daftar Pustaka**

Anderson Paul A. 1987. "What Do Decision Makers Do When They Make a Foreign Policy Decision?The Implications for the Comparative Study of Foreign Policy", in Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr., and James N. Rosenau, eds., *New Directions in the Study of Foreign Policy*. Boston, Unwin,hal. 285-308

*Bikin Cuitan Kontroversial, Trump Tidak Diblokir Twitter*, diakses melalui (<https://dunia.tempo.co/read/1048417/bikin-cuitan-kontroversial-trump-tidak-diblokir-twitter>) diakses pada 20 Agustus 2019

Eichenwald, Kurt.(2012). “The Deafness Before the Storm” diakses dari (<https://www.nytimes.com/2012/09/11/opinion/the-bush-white-house-was-deaf-to-9-11-warnings.html>) pada 7 Agustus 2019

*George W Bush: Winning the War on Terror*, diakses dari: (<http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3965454/George-W-Bush-winning-the-war-on-terror.html>), pada 20 Agustus 2019.

Hafizh(2018). “Kegagalan War on Terror, 17 Tahun Setelah 9/11” diakses dari (<https://www.asumsi.co/post/kegagalan-war-terror-17-tahun-setelah-911>) pada 7 Agustus 2019.

History.com, “A Timeline of the U.S-Led War on Terror” diakses dari (<https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline>) pada 7 Agustus 2019

John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. NewYork, Holt, Rinehart and Winston, Inc., hal. 59.

*Kontroversi Tahun Pertama Trump Sebagai Presiden*, diakses melalui (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171229172324-139-265537/video-kontroversi-tahun-pertama-trump-sebagai-presiden>) diakses pada 20 Agustus 2019

Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal. 7

Nugraha, Fajar. (2015). “11 September 2001, Serangan di Tanah Amerika Serikat” diakses dari (<https://www.medcom.id/internasional/amerika/nbw6a85N-11-september-2001-serangan-di-tanah-amerika-serikat>) pada 7 Agustus 2019.

Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin, eds., *Foreign Policy Decision-Making: Analytical perspective to the Study of International Politics*, New York, The Free Press, 1962 ; ValerieM. Hudson, Derek H. Chollet, and James M. Goldgeier, *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*.New York, Palgrave Macmillan, 2002.

Susan Lindauer, *Extreme Prejudice: The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover Ups of 9/11 and Iraq*, Create Space Independent Publishing Platform, 2010, hlm. 17-18.

*The Guardian: Guantánamo Bay branded 'a symbol of Islamophobia of Trump presidency'* (<https://www.theguardian.com/global->

[development/2019/jan/11/guantanamo-bay-branded-a-stain-on-us-human-rights-record](#)), diakses pada 20 Agustus 2019.

Trevor Thrall and Erik Goepner, “*Step Back: Lessons for U.S. Foreign Policy from The Failed War on Terror*” *Jurnal Policy Analysis* No. 814, 2017, Hal 1.